



Muncul Klaster Ponpes di Sleman

▶ Satgas ponpes sudah berkoordinasi dengan puskesmas setempat soal kelanjutan *screening* maupun aktivitas di ponpes.

▶ Pemda DIY kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 hingga 31 Oktober mendatang.

JOGJA—Transmisi kasus positif Covid-19 di Pondok Pesantren di Sleman mendominasi penambahan kasus Corona di Bumi Mataram pada Selasa (29/9). Penularan ini bahkan membentuk klaster pondok pesantren (ponpes).

Lajeng Padmaratri, Luqas Subarkah, & Herlambang
Jati Kusumo
redaksi@harianjogja.com

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan dari 49 penambahan kasus baru pada Selasa (29/9), Sleman mendominasi penambahan kasus sebanyak 46 kasus. Sebanyak 41 di antaranya berasal dari Klaster Pondok Pesantren.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan penambahan kasus berdasarkan domisilinya hanya meliputi dua kabupaten yakni Sleman 46 kasus dan Bantul tiga kasus. Jumlah itu muncul dari hasil pemeriksaan pada 702 sampel dari 662 orang.

Dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus yakni *screening* ponpes 41 kasus, *tracing* kasus positif (satu kasus), *screening* karyawan (satu kasus), *screening* pasien (satu kasus), dan masih dalam penelusuran (lima kasus). *Screening* Pendidikan tersebut dilakukan di salah satu sekolah di Sleman.



Muncul Klaster...

Dua kasus dilaporkan meninggal yakni Kasus 2.498, laki-laki, 65, warga Kota Jogja, dan Kasus 2.566, laki-laki, 53, warga Bantul. Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (21 kasus), Bantul (11 kasus), Kulonprogo (empat kasus), Gunungkidul (satu kasus), dan Sleman (22 kasus).

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sleman, Harda Kiswaya, menyatakan banyaknya kasus positif Covid-19 di Sleman berasal dari sejumlah ponpes. Saat ini, Pemkab Sleman berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 di masing-masing pesantren soal pemutusan penularan Covid-19. "Satgas ponpes sudah memastikan setelah kasus ini tidak lagi ada sembarangan orang keluar masuk ponpes," kata Harda.

Satgas ponpes tersebut juga sudah berkoordinasi dengan puskesmas setempat soal kelanjutan *screening* maupun aktivitas di ponpes. Harda yang juga menjabat sebagai Sekda Sleman ini mengungkapkan temuan kasus di salah satu pondok pesantren itu bermula dari salah seorang penghuni ponpes yang menuliri penghuni lainnya karena tidak memahami Covid-19 dan gejala yang timbul. "Ia merasa hilang pengecapan sejak Agustus, tapi enggak bilang," ujarnya.

Lantaran salah seorang penghuni ponpes itu sudah merasakan gejala, tetapi tidak melaporkannya ke Satgas Ponpes, ia tetap beraktivitas seperti biasa. Sayangnya, sejumlah penghuni lain mulai menunjukkan gejala Covid-19 dan melapor ke ponpes. Dari situ, *screening* dilakukan mandiri oleh ponpes dan ditemukan ada puluhan kasus penularan Covid-19.

"Saya apresiasi penanganan ponpes sangat baik, sebab mereka langsung memisahkan penghuninya yang bergejala, yang reaktif, dan yang positif. Yang positif ini dipisahkan jauh dari aktivitas penghuni lain, bahkan bangunannya terpisah satu kilometer," ungkap Harda.

Saat ini, pasien positif masih berada di ponpes tersebut lantaran ponpes sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Kendati demikian, ia meminta Dinas Kesehatan Sleman untuk

memperkuat sosialisasi terkait dengan gejala Covid-19 ke masyarakat. Ia juga meminta masyarakat untuk punya pemahaman dan keberanian untuk melapor jika merasakan gejala. "Ini gejala yang muncul enggak bisa mengecap. Maka saya minta Dinkes untuk lebih giat sosialisasi. Soalnya yang diketahui masyarakat gejalanya sesak napas. Yang penting lagi juga soal keberanian masyarakat untuk berani menyampaikan gejalanya," ujar Harda.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Joko Hastaryo menuturkan terkait dengan penularan kasus terkait dengan *screening* pendidikan ini membuat aktivitas pembelajaran di ponpes dihentikan sementara. "Kegiatan dihentikan sementara selama lima hari, mulai hari ini [kemarin]," kata Joko.

Tanggap Darurat

Pemda DIY kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 hingga 31 Oktober mendatang. Keputusan ini diambil mengingat pandemi Covid-19 di DIY masih terjadi hingga saat ini.

Perpanjangan Status Tanggap Darurat tercantum dalam Keputusan Gubernur DIY No.286/KEP/2020 tentang Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Covid-19 di DIY. Dalam aturan itu disebutkan Status Tanggap Darurat diperpanjang selama satu bulan, yakni dari 1-31 Oktober mendatang.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengatakan Pemda DIY kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat untuk kelima kalinya dengan pertimbangan pandemi Covid-19 di DIY belum berakhir. "Ya diperpanjang, *wong* belum selesai [pandemi Covid-19]," ujarnya, Selasa.

Ia melihat saat ini penambahan kasus positif harian masih berlangsung fluktuatif sehingga belum bisa dikatakan Covid-19 di DIY sudah menurun atau selesai. Dengan kondisi seperti ini, belum bisa diprediksi pula kapan pandemi akan berakhir. "Pasti diperpanjang [Status Tanggap Darurat]. Kami enggak tahu kapan selesai," ungkapnya.

Tempat Isolasi

Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

(PHRI) DIY menyatakan saat ini belum ada hotel yang mengajukan diri untuk tempat isolasi untuk orang tanpa gejala (OTG) Covid-19, karena banyak hal yang dipertimbangkan.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan sejumlah hal yang jadi pertimbangan, pertama citra hotel. "Pertama *image* hotel itu. Nanti khawatir ada yang berpandangan bekas tempat isolasi dan lain sebagainya. Kemudian khawatir juga karyawan terpapar," ucap Deddy, Selasa.

Dikatakan Deddy, sebenarnya penawaran tersebut juga bisa menjadi oksigen, atau pendapatan hotel di tengah ketidakpastian saat ini. Namun kembali lagi, ia mengungkapkan banyak hal yang harus dipertimbangkan, sehingga sampai saat ini belum ada hotel di DIY yang mengajukan diri.

Deddy mengaku sempat dihubungi Pemerintah Kota Jogja, terkait dengan penawaran hotel sebagai tempat isolasi OTG Covid-19 dan juga tenaga kesehatan. "Saya sempat dihubungi penawaran itu, dan sudah saya sampaikan ke teman-teman PHRI. Itu sebelum ada selter Tegalrejo, sekarang belum dihubungi lagi," ucapnya.

Ia juga mengatakan komunikasi tersebut masih secara lisan, dan belum ada prosedur pengajuan seperti apa secara resmi. Pada saat itu, ditawarkan untuk hotel nonbintang sampai bintang dua untuk OTG, dan hotel bintang tiga sampai lima untuk tenaga kesehatan. "Lalu saat diskusi dengan BPP PHRI saat ini juga di DIY belum masuk prioritas untuk itu. Semisal ada yang menawarkan hotel mengajukan, itu juga dilihat dulu apakah sesuai. Kemudian masyarakat sekitar bagaimana," ucapnya.

Terkait dengan kabar nama hotel yang melayani isolasi tidak akan dipublikasi, menurutnya hal tersebut tidak akan berpengaruh besar. Dalam artian saat ini informasi mudah sekali tersebar. "Kan itu pasti dijaga juga, orang akan penasaran ada apa. Kemudian sekarang melalui media sosial informasi juga mudah tersebar. Memang dilematis di sisi lain dapat meningkatkan *revenue*, tapi ya *image* jadi pertimbangan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005